

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN AKHLAK MULIADI SMA SANTUN UNTAN PONTIANAK

Oleh:

Yuliana Adhetia Pertama^{1*}

NIM :

E1011161026

Rusdiono², Indah Sulisdiani²

*Email: yulianaadhetia@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak,
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia di SMA Santun Untan Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn (2012: 158-168) bahwa ada enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: 1) Ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Masih belum optimal dikarenakan masih ada beberapa siswa yang tidak dapat mengikuti program dari kebijakan tersebut 2) Sumber-sumber kebijakan (financial). Sumber daya dalam implementasi program masih belum optimal, karena SMA Santun Untan Pontianak tidak memiliki dana khusus 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana. Sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak sekolah dengan maupun dinas terkait 4) Karakteristik Badan Pelaksana. Para guru berusaha semaksimal mungkin dalam mengayomi para siswa 5) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Belum optimal, karena latar belakang siswa yang berbeda-beda 6) Kecenderungan pelaksana. Sudah baik, karena sudah dilaksanakan dengan baik oleh para tenaga pendidik. Adapun saran yang direkomendasikan peneliti adalah memperkuat peraturan yang ada di sekolah, merangkul orang tua/wali murid dalam pembentukan karakter siswa, lebih rutin diadakannya kegiatan diskusi antar guru mata pelajaran dan dinas terkait, pemerintah bisa mendukung secara financial, para guru maupun staf sekolah bisa terus memperbaiki kinerja maupun respon terhadap para siswa, dan terakhir para tenaga pendidik maupun pelatih ekstrakurikuler diharapkan meningkatkan skill/kemampuannya.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pendidikan Karakter

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN AKHLAK MULIA DI SMA SANTUN UNTAN PONTIANAK

Oleh:

Yuliana Adhetia Pertama^{1*}

NIM :

E1011161026

Rusdiono², Indah Sulisdiani²

*Email: yulianaadhetia@student.untan.ac.id

3. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak,
4. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRACT

The research aims to analyze and determine the factors that influence the implementation of the Character Education policy in Santun Untan Pontianak High School. This research used descriptive research method with qualitative approach. This study used the theory of Van Metter and Van Horn (2012: 158-168) that six variables determine the success of implementing a policy, namely: 1) Basic measure and policy objectives. They are still not optimal because some students cannot follow the program from the said policy 2) Policy sources (financial). Resources in program implementation are still not optimal because Santun Untan Pontianak High School does not have special funds 3) Communication between organizations and activity implementers. Communication has been implemented well by the school and related agencies 4) Characteristics of the Implementing Body. The teachers do their best to educate the students 5) Economic, social, and political conditions. The conditions are not optimal because of the students' different backgrounds 6) The tendency of the implementer. It is decent because it has been implemented well by educators. It is suggested by the researcher to strengthen existing regulations at school, involve the students' parents/guardians in shaping the students' character, hold more regular discussion activities between subject teachers and related agencies, the government should support financially. In addition, the teachers and school staff should continue improving performance and response to students, finally educators and extracurricular trainers are expected to improve their skills/abilities.

Kata Kunci: Implementation, Policy, Character Education

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Sekolah merupakan salah satu wadah atau sarana dalam menuntut ilmu guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara formal. Disini peran pemerintah untuk ikut serta dalam meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia sangatlah besar, salah satunya adalah dengan membuat suatu kebijakan atau program untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kebijakan atau program pemerintah tersebut adalah Pendidikan Karakter yang diterapkan pada sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kebijakan pimpinan daerah yang memiliki wewenang untuk mensinergikan semua potensi yang ada di daerah tersebut termasuk melibatkan instansi-instansi lain yang terkait dan dapat menunjang pendidikan karakter ini.

Pemerintah kota Pontianak telah menetapkan payung hukum yang mendasari kebijakan pendidikan karakter, yaitu Peraturan Daerah Kota

Pontianak Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia. Dalam pasal 4 mengenai tujuan kebijakan tersebut berbunyi:

Tujuan dari Pendidikan karakter dan akhlak mulia bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

Implementasi Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia di SMA Santun tertuang dalam beberapa program yang sudah terlaksana. Adapun beberapa program tersebut diantaranya ekstrakurikuler (ekskul).

Ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan diluar dari jam belajar seperti biasa. Kegiatan ekstrakurikuler ini meliputi silat, sepak bola, dan tim olahraga. Kemudian kegiatan diluar jam belajar lainnya meliputi organisasi siswa dan komunitas belajar. Program pendidikan karakter yang dilaksanakan pada saat jam belajar adalah dengan belajar efektif. Dalam belajar efektif terdapat

16 nilai nilai pendidikan karakter yang tertuang dalam proses belajar mengajar.

Pelaksanaan RPP yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan akhlak mulia tersebut masih belum bisa dikatakan berhasil karena masih banyak kasus-kasus penyimpangan remaja yang dilakukan oleh beberapa siswa SMA Santun Untan.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. RPP dan program yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan karakter dan akhlak mulia di SMA Santun Untan tidak berjalan dengan maksimal.
2. Kondisi latar belakang keluarga, lingkungan, dan karakter dari siswa SMA Santun Untan yang berbeda-beda.
3. Nilai-nilai yang ditanamkan atau yang diajarkan dari konsep pendidikan karakter belum mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dan agar penelitian ini dapat dilaksanakan secara lebih mendalam serta ruang lingkup pembahasannya tidak terlalu luas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini yakni pada Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia di SMA Santun Untan Pontianak.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian: “Mengapa Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia Bagi Remajadi SMA Santun Untan Pontianak masih belum optimal?”

5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia di SMA Santun Untan Pontianak.

6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh, manfaat yang pertama adalah manfaat teoritis, manfaat ini dimaksud sebagai langkah pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teori, sedangkan manfaat yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu pemecahan permasalahan secara nyata. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah referensi bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara pada kajian kebijakan publik khususnya implementasi kebijakan Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan kepada SMA Santun Untan Pontianak dapat dijadikan sebagai masukan agar kedepannya dapat lebih optimal dalam mengimplementasikan Pendidikan Karakter dan

Akhlak Mulia dalam proses belajar mengajar..

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

a. Kebijakan Publik

Wilson dikutip dalam Solichin Abdul Wahab (2017:13), merumuskan kebijakan public sebagai tindakan- tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Kebijakan publik menurut David Easton (Suaib, 2016:1) merupakan “public policy is the authoritative allocation of values for the whole society”. Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat. Dari beberapa pengertian kebijakan publik di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik itu harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target groups).

c. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Suatu implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang

diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2012: 158-168) ada enam variable yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yakni:

1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan

Identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi

yang efektif. Dalam praktik implementasi kebijakan, kita sering mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai program-program yang telah direncanakan.

3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Komunikasi di dalam dan antar organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Menurut Van Metter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Seperti yang dinyatakan Van Metter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai

hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan public secara khusus ditarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan.

6. Kecenderungan Pelaksana

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

2. Alur Pikir Penelitian

Kerangka Teori

<p style="text-align: center;">Judul</p> <p>Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia (Studi Kasus SMA Santun Untan Pontianak)</p>
<p style="text-align: center;">Identifikasi Masalah</p> <ol style="list-style-type: none">1. RPP dan program yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan karakter dan akhlak mulia di SMA Santun Untan tidak berjalan dengan maksimal.2. Kondisi latar belakang keluarga, lingkungan, dan karakter dari siswa SMA Santun Untan yang berbeda-beda.3. Nilai-nilai yang ditanamkan atau yang diajarkan dari konsep pendidikan karakter belum mencapai tujuan yang diinginkan.
<p style="text-align: center;">Teori</p> <p>Model Implementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan2. Sumber Daya3. Karakteristik Agen Pelaksana4. Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.
<p style="text-align: center;">Output</p> <p>Tercapainya tujuan pendidikan karakter dan akhlak mulia di SMA Santun Untan</p>

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan jenis penelitian deskriptif dan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan sesuai dengan apa yang ada saat penelitian dilakukan, dan kemudian dianalisis. Bisa ditegaskan bahwa “Qualitative research descriptive. The data collected is in the form of words of pictures rather than number (penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka)” (Sugiyono, 2018:15).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan fokus yang akan diteliti, maka lokasi penelitian dalam rangka penyusunan penelitian ini adalah SMA Santun Untan Pontianak. Waktu penelitian dilaksanakan pada Maret hingga Agustus 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Guru BK (bimbingan konseling) SMA Santun

Untan Pontianak, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Informan-informan tersebut adalah:

1. Kepala Sekolah SMA Santun Untan
2. Wali Kelas XI IIS
3. Guru BK (bimbingan konseling) SMA Santun Untan Pontianak.
4. Guru Penjaskes SMA Santun Untan Pontianak.
5. Guru PKN SMA Santun Untan Pontianak.
6. Kepala Peserta Didik dan Pembangunan Karakter (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat).
7. Koordinator Pelatihan (LPMP Kalimantan Barat).

Objek penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia pada SMA Santun Untan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Karakter dan Akhlak Mullia di SMA Santun Untan Pontianak.

5. Instrument atau Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat dokumentasi.

6. Analisis Data

Dalam analisis keabsahan data peneliti menggunakan Uji Validasi dan pada penelitian ini yang digunakan peneliti adalah Trianggulasi Sumber, yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah ada dari berbagai sumber dengan cara membandingkan, menanyakan kembali kepada sumber atau informan yang peneliti anggap mengerti tentang data yang didapat peneliti sampai peneliti benar-benar yakin bahwa data itu valid.

D. HASIL PENELITIAN

1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan

Kinerja suatu kebijakan tidak terlepas dari adanya suatu ukuran dan

tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan dijadikan sebagai pedoman ataupun standar pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Kemana arah dari kebijakan yang akan diimplementasikan tergantung daripada ukuran dan tujuan kebijakan tersebut. Ukuran kebijakan pada ranah ini tentunya akan memberikan pandangan terhadap poin-poin yang akan dicapai. Hal tersebut tentunya akan berkaitan terhadap suatu kebijakan yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan publik.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2012: 158-168) ukuran-ukuran dasar dan tujuan –tujuan kebijakan merupakan identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

Dari hasil beberapa wawancara diatas, dapat disimpulkan sementara bahwa faktor ukuran-ukuran dasar dan

tujuan-tujuan kebijakan dalam mengimplementasikan Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia di SMA Santun Untan masih belum optimal karena masih ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti program pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Pihak sekolah juga belum bisa mengatasi kendala tersebut atau menemukan solusi yang tepat.

2. Sumber Daya

Pengimplementasian kebijakan publik tidak hanya melihat apakah tujuannya sudah tercapa atau belum, tetapi masih ada faktor lain yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan tersebut. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik juga tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang dimaksud disini adalah sumber daya financial (dana).

Menurut Van Meter & Van Horn, sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktik implementasi

kebijakan, kita sering mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai program-program yang telah direncanakan.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan sementara bahwa dari segi sumber daya financial (dana) dalam pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia di SMA Santun masih belum optimal karena tidak ada anggaran.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan akansangat tergantung pada kondisi dari badan pelaksana dalam melakukan tugas masing-masing. Hal tersebut dapat tercermin dari seberapa besar tanggung jawab yang mereka dapatkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Pada konteks ini, pelaksana kebijakan dituntut untuk bersikap professional dalam melaksanakan tugasnya.

Implementasi suatu kebijakan diperlukan struktur birokrasi yang mampu bekerja secara efektif dan efisien serta harus mampu membangun kerjasama antar bagian yang bertujuan

untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila ada salah satu bagian dalam struktur birokrasi yang bekerja diluar kemampuan yang ada, serta tidak berfungsi pada bagian tersebut secara maksimal maka hal tersebut akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan pernyataan Waka. Kesiswaan dan " Guru BK (Bimbingan Konseling) SMA Santun Untan terkait karakteristik dari agen pelaksana kebijakan Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia di SMA Santun Untan dapat disimpulkan bahwa, setiap implemetor khusus disini yang dimaksud adalah para guru, sudah menjalankan tugasnya, yaitu dengan menyisipkan nilai-nilai pendidikan karakter atau budi pekerti pada setiap mata pelajaran pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Disini para guru berusaha semaksimal mungkin dalam mengayomi para siswa agar memiliki budi pekerti yang baik. Para guru memberi respon yang baik terhadap para siswa dalam mengimplementasikan pendidikan karakter dan akhlak mulia ini. Para guru dapat merespon segala

masalah tingkah laku yang terjadi dalam proses pembelajaran. Guru BK juga siap memberikan pendampingan atau berdiskusi dengan siswa yang bermasalah. Pendampingan atau diskusi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh sekolah melalui guru BK untuk para siswa yang sedang memiliki masalah dalam nilai akademik maupun masalah dalam keluarganya sehingga diberikan pendampingan oleh guru BK untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut dan memberikan motivasi bagi para siswa yang bermasalah. Diskusi juga dilakukan dengan para siswa yang sedang bingung untuk memilih jurusan yang tepat baik itu memilih jurusan pada saat masuk SMA maupun jurusan ketika akan memasuki jenjang perguruan tinggi.

4. Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana

Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran para pelaksana terhadap kebijakan secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa suatu kegagalan implementasi kebijakan sering disebabkan karena ketidakpahaman para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam kaitannya

dengan sikap/kecenderungan, maka para pelaksana memegang peranan yang penting. Sikap/kecenderungan yang ditunjukkan para pelaksana tersebut akan menentukan arah implementasi suatu kebijakan yang mana telah telah dikerjakan dengan sepenuh hati ataupun hanya sekedar saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa sikap/kecenderungan dan pemahaman yang dimiliki oleh implementor dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter dan akhlak mulia di SMA Santun Untan sudah dilaksanakan dengan baik oleh para tenaga pendidik (guru) maupun para pelatih pada kegiatan ekstrakurikuler. Yaitu dilihat pada saat proses belajar mengajar, para guru sebisa mungkin menjadi contoh yang baik untuk para siswa dengan hadir tepat waktu dan melaksanakan keenam belas (poin) nilai-nilai pendidikan karakter yang diintegrasikan pada setiap mata pelajaran yang tertuang dalam Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP). Para tenaga pendidik dan pelatih dalam mengimplementasikan pendidikan karakter ini juga dibekali dengan ilmu

dan skill yang mereka miliki dalam mendukung berjalannya implementasi pendidikan karakter dan akhlak mulia di SMA Santun Untan Pontianak. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang dimiliki SMA Santun Untan Pontianak ini adalah kegiatan Pramuka, Silat, Futsal, dan Baca Tulis Al-Quran. Pada tahun 2017 terdapat empat (4) siswa yang dikeluarkan dari sekolah karena melakukan perilaku menyimpang, kemudian pada tahun 2018 terdapat dua (2) siswa yang dikeluarkan dari sekolah, terakhir pada tahun 2019, tercatat satu (1) siswa yang dikeluarkan dari sekolah. ini menandakan bahwa kebijakan pendidikan karakter dan akhlak mulia di SMA Santun Untan Pontianak berjalan baik.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi sangatlah berpengaruh terhadap suatu kinerja pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh badan atau organisasi. Dengan komunikasi yang baik setiap hubungan antar organisasi terkait dapat saling terkoordinasi dan saling melengkapi satu sama lain. Komunikasi yang dijalin antar

badan/organisasi akan memberikan petunjuk terkait mekanisme atau prosedur dalam mencapai tujuan kebijakan. Komunikasi antar organisasi juga mengharapkan adanya pola berhubungan yang erat dan saling memberikan dukungan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Disimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan karakter dan akhlak mulia di SMA Santun Untan Pontianak sudah optimal karena dari pihak tenaga pendidik maupun dari badan/dinas terkait telah berupaya semaksimal mungkin dan bekerjasama dalam proses implementasi pendidikan karakter tersebut. Kerjasama yang dilakukan oleh sekolah-sekolah beserta tenaga pendidik dan badan/dinas dilakukan agar implementasi pendidikan karakter dan akhlak mulia bisa berjalan sebagaimana mestinya.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Menurut Van Meter & Van Horn (dalam Winarno 2012: 158-168), dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik

merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus ditarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan.

Hal yang perlu diperhatikan juga guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat disimpulkan sementara bahwa kondisi ekonomi dan sosial para siswa di SMA Santun Untan mempengaruhi proses implementasi pendidikan karakter dan akhlak mulia di sekolah tersebut. Kondisi ekonomi beberapa siswa yang mengharuskan mereka bekerja sehingga mereka tidak bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, padahal kegiatan itu merupakan salah

satu program dari pendidikan karakter. Beberapa siswa yang memiliki background yang berasal dari latar belakang keluarga yang broken home (cerai) cenderung memiliki karakter yang menyimpang dari siswa yang lain sehingga implementasi pendidikan karakter dan akhlak mulia di SMA Santun Untan masih belum optimal.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan program pendidikan karakter masih belum optimal karena masih ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti program pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah karena ada beberapa siswa yang harus bekerja diluar jam sekolah dan ada beberapa siswa yang tidak menyukai kegiatan ekstrakurikuler sehingga mereka absen untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- b. Sumber Daya, Sumber daya kebijakan khususnya financial (dana) dalam implementasi

kebijakan pendidikan karakter dan akhlak mulia masih belum optimal karena tidak ada anggaran khusus dan hanya menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan pihak sekolah harus membuat proposal terlebih dahulu dalam melaksanakan kegiatan. Pemerintah hanya memberikan fasilitas pelatihan untuk kepala sekolah dan tidak ada dukungan dari segi financial (dana).

- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan karkater dan akhlak mulia di SMA Santun Untan Pontianak sudah dilakukan dengan optimal pihak sekolah maupun dinas terkait saling berkoordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kerjasama juga dilakukan oleh sekolah-sekolah beserta tenaga pendidik dan badan/dinas dilakukan agar implementasi pendidikan karakter dan akhlak mulia bisa berjalan sebagaimana mestinya.
- d. Karakteristik badan pelaksana kebijakan pendidikan karakter dan akhlak mulia di SMA Santun Untan Pontianak maka penulis menarik

kesimpulan bahwa karakteristik dari badan pelaksana sudah baik. Hal ini, telah ditetapkan para guru dengan berusaha semaksimal mungkin dalam mengayomi para siswa agar memiliki budi pekerti yang baik. Para guru memberi respon yang baik terhadap para siswa dalam mengimplementasikan pendidikan karakter dan akhlak mulia ini, guru BK juga siap memberikan pendampingan atau berdiskusi dengan siswa yang bermasalah.

- e. Kondisi-kondisi ekonomi dan sosialmemiliki pengaruh yang sangat besar dalam implementasi kebijakan pendidikan karakter dan akhlak mulia di SMA Santun Untan yang menyebabkan belum optimal. Dikarenakan kondisi ekonomi para siswa yang berbeda-beda, beberapa siswa memiliki latar belakang keluarga yang berasal dari keluarga broken home (cerai), dan lingkungan asal para siswa.

- f. Sikap/kecenderungan pelaksana terhadap kebijakan pendidikan karakter dan akhlak mulia implementor dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter dan akhlak mulia di SMA Santun Untan

sudah dilaksanakan dengan baik oleh para tenaga pendidik (guru) maupun para pelatih pada kegiatan ekstrakurikuler. Para tenaga pendidik dan pelatih dalam mengimplementasikan pendidikan karakter ini juga dibekali dengan ilmu dan skill yang mereka miliki dalam mendukung berjalannya implementasi pendidikan karakter dan akhlak mulia di SMA Santun Untan Pontianak.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam skripsi ini. Berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan lagi bagi SMA Santun Untan Pontianak untuk bisa semaksimal mungkin dalam mengimplementasikan pendidikan karakter dan akhlak mulia bagi para siswa sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

F. REFERENSI

SUMBER BUKU

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hasbullah. 2015. *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi*

Objektif Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter; Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Askara.

Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.

Subarsono, Agustinus. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suntoro, Irawan., dan Hasan Hariri. 2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Subarsono, Agustinus. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*

dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Suntoro, Irawan., dan Hasan Hariri. 2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zuriah, Nurul. 2009. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Akasara.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia.

SUMBER INTERNET

Hi!Pontianak, 2019. "BNN Kalimantan Barat Akui Kekurangan Personel Perangi Narkoba" pada [https://kumparan.com/hipontianak/bnn-kalimantan-barat-akui-](https://kumparan.com/hipontianak/bnn-kalimantan-barat-akui-kekurangan-personel-perangi-narkoba)

kekurangan-personel-perangi-narkoba. Diakses pada 20 Oktober 2019

Syahroni, 2019. "Persen Kehamilan Tak Terencana di Kalbar Akibat Pergaulan Bebas" pada <https://pontianak.tribunnews.com/2019/03/17/247-persen-kehamilan-tak-terencana-di-kalbar-akibat-pergaulan-bebas>. Diakses pada 20 Oktober 2019

